



The Indonesian Journal of Social Studies

Available at <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpips/index>

Pengaruh Politik Etis Kolonial Belanda Terhadap Pertanian dan Ekonomi Lokal di Lampung

Rafiqoh Salma HS¹⁾, Reviana Dewi²⁾, Lia Wulandari³⁾ Purwanto Putra⁴

Program Studi Pendidikan Sejarah
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota
Bandar Lampung, Lampung, 35141

* e-mail: rafiqohsalmahsktb@gmail.com, revianaana92@gmail.com,
liawulanmn29@gmail.com, purwanto.putra@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Politik Etis dan kebijakan ekonomi kolonial Belanda di Lampung, serta dampaknya terhadap pertanian dan masyarakat setempat. Sub bab pertama menguraikan pengertian Politik Etis, yaitu kebijakan kolonial Belanda yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi melalui pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Selanjutnya, dibahas kebijakan ekonomi kolonial Belanda di Lampung yang melibatkan pengenalan tanaman ekspor dan pembangunan infrastruktur irigasi. Sub bab ketiga menganalisis pengaruh kebijakan ekonomi Politik Etis terhadap pertanian di Lampung, termasuk peningkatan produktivitas dan diversifikasi tanaman. Pengaruh Bendung Argoguruh terhadap kolonisasi Sukadana juga dibahas, menunjukkan bagaimana proyek irigasi ini mendukung perpindahan penduduk dan pengembangan lahan pertanian baru. Terakhir, penelitian ini mengevaluasi dampak Politik Etis dalam memperkenalkan tanaman kualitas ekspor seperti kopi, teh, dan karet kepada masyarakat Lampung, yang secara signifikan mengubah struktur ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan Politik Etis memiliki tujuan yang positif, implementasinya seringkali lebih menguntungkan pihak kolonial dibandingkan masyarakat pribumi.

Kata Kunci: Politik etis, Dampak terhadap pertanian, Lampung

Abstract

This research discusses Ethical Politics and Dutch colonial economic policies in Lampung, as well as their impact on agriculture and local communities. The first subchapter explains the meaning of Ethical Politics, namely Dutch colonial policy which aims to improve the welfare of indigenous people through education, irrigation and transmigration. Next, the Dutch colonial economic policy in Lampung is discussed which involved the introduction of export crops and the development of irrigation infrastructure. The third subchapter analyzes the influence of Ethical Political economic policies on agriculture in Lampung, including increasing productivity and crop diversification. The influence of the Argoguruh Dam on the colonization of Sukadana is also discussed, showing how this irrigation project supported population movement and the development of new agricultural land. Finally, this research evaluates the impact of Ethical Politics in introducing export quality crops such as coffee, tea and rubber to the people of Lampung, which significantly changed the local economic structure and improved the welfare of farmers. The research results show that although Ethical Politics policies have positive objectives, their implementation often benefits colonial parties more than indigenous communities

Keywords: Ethical politics, Impact on agriculture, Lampung

*Corresponding author:

e-ISSN 2615-5966 (Online)

E-mail: rafiqohsalmahsktb@gmail.com

This is an open access article under the CC-BY- SA license



PENDAHULUAN

Pada tahun 1901 hingga tahun 1942, penjajah Belanda menggunakan program politik yang berorientasi pada etika yang dikenal dengan Politik Etis. Politik Etis (Ehische Politiek) yang sering juga disebut dengan politik balas dendam adalah suatu kebijakan yang digunakan pemerintah Belanda sebagai kompensasi atas pengorbanan rakyat Indonesia pada masa pemasangan sistem kebudayaan. Lampung merupakan salah satu daerah kolonial Belanda yang menganut prinsip politik etis. Lampung pernah menjadi bagian dari Kesultanan Banten, namun setelah Daendels membubarkannya, diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda mengikuti program politik etis seperti penjajahan, pendirian sekolah, dan pembangunan kanal (Karsiwan et al., 2021).

Program politik etis ini berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa melalui pembangunan jalan desa, pelayanan kesehatan, dan jaringan irigasi untuk mendorong kesejahteraan pertanian dan penyebaran penduduk dari tempat yang banyak penduduknya (Jawa) ke daerah yang jarang penduduknya (luar Pulau Jawa). . Program pemerintah Belanda pada tahun 1905 menghasilkan strategi politik etis yang memungkinkan proyek pertanian dan distribusi penduduk diperiksa menggunakan berbagai sumber pengeluaran pemerintah, sistem pinjaman, dan sistem Bawon (Kuswono, 2019).

Penerapan politik etis yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda tidak dapat dipisahkan dari tujuan kolonialnya. Meskipun politik etis berupaya mendorong pertumbuhan Indonesia, hal ini dilakukan dalam kerangka pengawasan Belanda. Pendekatan ini memandang koloni lebih dari sekedar sumber uang bagi Belanda, tetapi juga sebagai wilayah yang harus dikembangkan dengan berbagai cara, termasuk pembangunan sosial, ekonomi, dan pendidikan (Susilo, 2018).

"Tiga serangkai van Deventer" terdiri dari tiga agenda politik etis: irigasi, kolonialisme, dan sosial ekonomi (pendidikan). Irigasi digunakan di perkebunan untuk mendorong pertanian dan memastikan distribusi penduduk yang adil. Sementara itu, pendidikan dikaitkan dengan reaksi terhadap tuntutan tertentu pemerintah, sehingga menghasilkan elit (terpelajar) masa kini (Rangga Galih, 2017)..

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data untuk pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Informasi penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku dan publikasi ilmiah, berita, dan laporan resmi. Peneliti menggunakan kata kunci untuk mencari bahan di perpustakaan, database online, dan website resmi (Afarat Y Gusti, 2018).

Sumber terverifikasi diperiksa secara cermat keaslian dan kejelasannya serta terbukti kebenarannya. Setelah evaluasi eksternal dan internal, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan peristiwa berdasarkan berbagai hubungan dan presentasinya kepada pengguna. Perpaduan kedua tahapan tersebut memunculkan peristiwa-peristiwa suatu karya tulisan (Kartodirdjo, 1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Politik Etis

Pada sekitar abad ke-20 terjadi perkembangan baru politik koloni belanda di Indonesia. Kebijakan baru yang muncul itu karena didasari oleh kemajuan masyarakat Indonesiayang semakin besar. Politik baru itu disebut politik etis. Politik etis adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda

di Indonesia pada masa penjajahan. Kebijakan ini bertujuan untuk memajukan bangsa Indonesia sambil tetap berada di bawah kekuasaan Belanda. Meskipun awalnya dilaksanakan dengan tanggung jawab, politik etis tidak langsung memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Namun, kebijakan ini berhasil mengubah pola hidup masyarakat dengan memperkenalkan sistem irigasi modern dan pertanian yang lebih efisien. Program emigrasi atau transmigrasi juga dilakukan untuk mengirimkan penduduk dari pulau Jawa ke daerah-daerah lain di Indonesia, yang membantu mempererat hubungan antar masyarakat dan memperluas pemahaman mereka tentang budaya dan kehidupan di berbagai wilayah (Susilo, 2018).

Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmina menguraikan berbagai inisiatif politik etis, termasuk irigasi, migrasi, dan pendidikan. Pada bagian irigasi kolonial Belanda, mereka membangun infrastruktur atau membangun irigasi untuk mengalirkan air ke wilayah Belanda. Selain itu, emigrasi yang dilakukan adalah pertama dengan mengirimkan orang-orang pribumi ke perkebunan-perkebunan Belanda untuk melakukan kerja paksa, kemudian dalam bidang pendidikan kolonial Belanda, dimana para pelajar priyayi diajar hingga mempunyai kebudayaan Belanda dan diakui sebagai wakil jajahan Belanda di Belanda. masyarakat (Adi Kurniawan, Anindya Prameswari, 2019).

Kebijakan Ekonomi Kolonial Belanda di Lampung

Pada tahun 1901 kolonial Belanda menerapkan kebijakan politik etis yang mengharuskan pemerintahan Belanda memberikan kemajuan terhadap keselamatan rakyat Indonesia baik dalam hal kesehatan serta pendidikan. kebijakan-kebijakan baru lainnya yaitu irigasi, migrasi, komunikasi, mitigasi banjir, industrialisasi serta perlindungan masyarakat Indonesia. Industrialisasi tidak memberikan dampak yang tertentu kepada sebagian besar masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia masih menjadi negara jajahan yang bernaung terhadap pertanian (Sattar, 2018).

Wilayah Lampung mulai berkembang dalam bidang ekonomi dan perdagangan pada masa Kesultanan Banten, dan juga dimanfaatkan sebagai perkebunan lada mulai abad ke-17. Lada menjadi daya tarik utama para transmigran untuk bekerja dan membuka perkebunan di wilayah Lampung, khususnya di sekitar Tulang Bawang. Pada masa kolonial, masyarakat Lampung mengenal dua jenis pola pertanian: sawah dataran rendah (rawa) dan sawah beririgasi. Sejak tahun 1905, pola pertanian ini berkembang seiring dengan penjajahan (transmigrasi) penduduk Jawa. Selain itu, penduduk juga menghasilkan tanaman pangan tambahan antara lain umbi-umbian dan jagung (Ariwibowo, 2018).

Beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda dalam kebijakan ekonominya diantaranya :

- **Cultuurstelsel**

Ketika perekonomian sedang terpuruk, pemerintah Belanda merancang berbagai taktik dan konsep ekonomi untuk membantunya pulih dengan cepat. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produksi koloni sehingga dapat menopang negara asal di masa depan. Pada tahun 1830, kebijakan resmi yang dikenal sebagai Cultuurstelsel ditetapkan berdasarkan prinsip ini. Namun organisasi liberal penentang Cultuurstelsel menyebut strategi ini sebagai penanaman paksa (Yuli Kristian, 2019).



Gambar 1. Komoditas ekspor Tembakau di Lampung 1830

Sumber : <https://anri.go.id/>

Cultuurstelsel: Semasa Era Kolonial "Sapi Perah".

"Pada prinsipnya dalam sistem tanam paksa ini, masyarakat terpaksa menyerahkan 1/5 tanahnya, terpaksa menanaminya dengan tanaman-tanaman yang dibutuhkan pemerintah, masyarakat terpaksa menggarap tanah tersebut tanpa upah, terpaksa mengangkut bahan pertanian, dan dipaksa bekerja di pabrik."

Cultuurstelsel mendorong peralihan dari metode manufaktur tradisional ke metode manufaktur rasional. Menurut Piccardt, gagasan ini tidak lagi hanya sekedar tentang kualitas lahan subur, pengelolaan lahan, dan teknik pertanian, namun semakin tentang memilih barang-barang yang diinginkan dalam jumlah besar, memperoleh tenaga kerja dan membayarnya. Terakhir, ada fokus pada pembentukan keluarga negara. Strategi Johannes van den Bosch memaksa petani Jawa untuk menanam kopi, tebu, nila, dan tanaman ekspor lainnya. Produk-produk ini selanjutnya dikirim ke gudang-gudang pemerintah di sekitar Pulau Jawa. Para petani mendapat penggantian atas hasil panen mereka, sementara para pejabat menerima bagiannya (Vincent, J.H. Houben, 2002).

Penanaman (*cultuurprocenten*) untuk meningkatkan produksi. Namun pemberian insentif kepada masyarakat bersifat sewenang-wenang karena tidak mencerminkan nilai pasar komoditas tersebut atau tenaga kerja yang dibutuhkan petani untuk mengolahnya. Dengan cara ini, pemerintah Belanda menguasai industri ekspor Jawa setelah pengusaha swasta gagal melakukannya sebelum tahun 1830. Kebijakan ini mengintegrasikan Jawa ke dalam sistem komersial global, dengan perdagangan dan pelayaran Belanda memainkan peran penting. Barang-barang ini dibawa ke tanah air dengan kapal Belanda. oleh perusahaan semi-nasional yang dikenal dengan nama "Nederlandsche Handel." (C. Fasseur, 1986). Kebijakan Cultuurstelsel pertama kali terfokus di Pulau Jawa, dan baru diterapkan di Sumatera Barat pada tahun 1847 untuk komoditas kopi. Sementara itu, di Lampung, di mana pemerintahan Belanda baru terbentuk setelah tahun 1856, terjadi masa tanam paksa lada. Dengan harga tetap, sehingga membatasi produksinya.

- **Pemberlakuan Ekonomi Liberal (1870-1900) di Lampung**

Kemenangan anggota parlemen liberal di parlemen Belanda berdampak pada wilayah jajahan. Konsekuensi akhirnya adalah perubahan kebijakan dengan tingkat independensi yang menurunkan, atau bahkan menghapuskan, keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi langsung, kecuali dalam bidang administrasi. Konsekuensinya, dengan menggunakan uang yang dimilikinya, pihak swasta akan menggantikan negara sebagai Penyelenggara kegiatan ekonomi dalam kerangka liberalisme yang sejalan dengan semangat kapitalisme. Pendekatan ini mula-mula digunakan di Hindia Belanda antara tahun 1866 dan 1872, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Pieter Mijer. Agrarische Wet atau Hukum Agraria didirikan pada tahun 1870. Hakikat dari peraturan Agrarische Wet yang membuka peluang bagi berkembangnya usaha perkebunan di Hindia Belanda untuk penanaman modal adalah tanah yang disewakan, baik tanah pemerintah dengan jangka waktu sewa yang maksimal. berumur 75 tahun dan tanah yang diusahakan oleh penduduk paling sedikit 25 tahun (A. Daliman, 2012).

Aturan ini memungkinkan perusahaan perkebunan yang semula didirikan di Pulau Jawa meluas hingga ke Pulau Sumatera, salah satunya di Lampung dan menghasilkan kopi dan karet, dua produk unggulan pada masa penerapan kebijakan ekonomi liberal. Lampung mempunyai sistem penyewaan tanah, meskipun penduduknya mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik adat, baik secara individu maupun kolektif, termasuk wilayah yang ditanami dan tidak ditanami. Antara tahun 1870 hingga 1900, pemerintah Belanda menerapkan ekonomi liberal di Lampung yang memberikan berbagai manfaat. Sebagai permulaan, strategi ini memungkinkan investasi swasta di perkebunan besar kopi, teh, gula, dan kina di Belanda dan negara lain di seluruh Eropa. Kedua, sistem pertanian paksa yang sebelumnya diterapkan telah dihapuskan, sehingga masyarakat dapat mengeluarkan uang mereka sendiri. Ketiga, pemerintah Belanda mendapat keuntungan besar dari pajak dan pendapatan lain yang dihasilkan oleh perkebunan besar-besaran yang diproduksi oleh sektor swasta. Keuntungan ini luar biasa besarnya, diperkirakan mencapai 967 juta gulden yang jika dirupiahkan saat ini setara dengan Rp8.360.766.400.727,00. (A.M. Hens, 1909).

- **Pemberlakuan Politik Etis (1900-1942) di Lampung**

Politik Etis (*Ethische Politiek*) adalah eksekusi keyakinan para kritikus yang mengkritik liberalisme ekonomi karena bersifat eksploitatif dan hanya menguntungkan negara asal, mengabaikan rakyat daerah jajahan. Meski berkontribusi terhadap kemakmuran Belanda, kesejahteraan daerah jajahan mengalami penurunan sepanjang abad ke-19. Jadi gagasan untuk memperhatikan penduduk setempat muncul sebagai semacam imbalan atas sesuatu yang dikenal sebagai “hutang kehormatan” (*ereschuld*) (G. Moedjanto, G. Moedjanto, 1998).



Gambar 2. Pembangunan Irigasi dan Jembatan Beton Way Balau di Teluk Betung

Sumber: <https://www.universiteitleiden.nl/en>

“Menggambarkan keadaan Jembatan Beton di Kuripan, Kecamatan Telubetung Barat, Bandarlampung yang masih dalam kondisi baik hingga saat ini. Berfungsi sebagai penghubung dalam pengangkutan hasil laut.”

C.Th. Van de Venter adalah salah satu kritikus yang berperan penting dalam mengembangkan model penerapan strategi ini. Pada tahun 1899, ia menerbitkan esai berjudul *Een Eereschuld* di Majalah *de Gids*, yang berisi kritik dan gagasannya. Menurut Van de Venter, Belanda sebagai negara maju dan bermoral, harus membayar utang tersebut sebagai penyeimbang eksploitasi berlebihan pada masa-masa sebelumnya dengan menerapkan kebijakan yang berdampak langsung pada kemajuan pribumi berupa irigasi, emigrasi, dan pendidikan. Yang dikenal sebagai triad van de Venter. Belanda memperoleh manfaat dari penerapan politik etis di Lampung antara tahun 1900 dan 1942 dalam berbagai cara. Pertama, Politik Etis meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan di Lampung dengan meningkatkan efisiensi irigasi dan

mengembangkan lahan yang lebih luas. Peningkatan output ini menyiratkan bahwa Belanda dapat meningkatkan ekspor barang-barang ekspor yang meningkat sebagai akibat dari penanaman tanah asli, yang menunjukkan bahwa penduduk setempat berhak mendapatkan perhatian dalam meningkatkan kualitas kekayaan, perdamaian, dan kesejahteraan (Danu Ranu Setiawan dan Ali Imron Dkk, 2018).

Kedua, Politik Etis meningkatkan pendapatan Belanda dengan mengenakan pajak atas barang-barang pertanian dan perkebunan yang bersumber dari Lampung. Pajak ini merupakan sumber uang penting bagi pemerintah Belanda. Dana ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang berbeda, termasuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Ketiga, Politik Etis berkontribusi terhadap kekuatan ekonomi Belanda dengan meningkatkan kapasitas penduduk asli dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan menghasilkan produk siap ekspor. Dengan cara ini, Belanda dapat meningkatkan pendapatan ekspor dan pendapatan masyarakat. Manfaat lain yang diperoleh Belanda dari penerapan Politik Etis adalah meningkatnya pengaruh dan kendali Belanda terhadap masyarakat Lampung. Politik Etis mengedepankan kepentingan Belanda dalam masyarakat dengan meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, menjadikan masyarakat lebih bergantung pada bantuan Belanda dan lebih mudah dikendalikan. Namun, penting untuk menyadari bahwa Politik Etis mempunyai pengaruh yang merugikan terhadap budaya Lampung, seperti meningkatnya permintaan akan pekerja terlatih. mungkin dieksploitasi oleh Belanda, sehingga memperburuk kemiskinan di kalangan masyarakat adat (Pebrianti, 2019).

Pengaruh Kebijakan Ekonomi Politik Etis Terhadap Pertanian di Lampung

Pada saat Belanda memasuki fase keruntuhan keuangan negaranya pemerintah Belanda membuat berbagai strategi dan konsep ekonomi agar dapat keluar dari masa suram ini. Tujuan pertama yang mereka lakukan yaitu membuat lahan koloni lebih menghasilkan panen yang baik. Kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh koloni Belanda itu sebagai langkah untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia dan pasar lokal untuk memenuhi kebutuhan perekonomian Belanda, pemerintah koloni Belanda melakukan praktik seperti monopoli-monopoli perdagangan, pembebasan lahan skala besar, menggunakan sistem kerja rodi serta pembangunan infrastruktur yang lebih memberikan keuntungan banyak terhadap penjajah Belanda dibandingkan masyarakat Indonesia (Kristiani, 2015).

Pertumbuhan jumlah penduduk dan keberhasilan para imigran baik dari komunitas pertanian maupun bisnis seiring berjalannya program menjadikan mereka sebagai entitas yang harus lebih memperhatikan keberadaan mereka ketika berinteraksi dengan masyarakat adat. Sebagai koloni dengan budaya khas dan penggunaan lahan pertanian yang luas, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai hak-hak individu dan status tanah yang dimiliki dan dikontrol secara administratif oleh kelompok-kelompok ini. Oleh karena itu perlu diatur hak dan administrasi adat atas tanah bagi kedua komunitas tersebut untuk menciptakan ketertiban dan mencapai tujuan penjajahan sehingga Belanda dapat lancar dalam melakukan pembangunan ekonomi (Kristiani, 2015).

Pada era politik etis, pemerintah menghadapi kekurangan beras. Upaya mengatasi permasalahan perbekalan ini merupakan bagian dari paket strategi politik etis yang dikenal dengan semboyan Trias van de Venter, yang mencakup pendidikan, irigasi, dan migrasi. Itu dilaksanakan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Willem Rooseboom (1899-1904). Migrasi dan irigasi adalah dua contoh penerapan topik ini. Menurut Schalkwijk - kepala kolonial Gedong Tatan, salah satu tujuan penjajahan adalah untuk meningkatkan pasokan beras dengan memobilisasi tenaga kerja dari penduduk padat di Jawa melalui sawah dan sistem irigasi. Upaya jangka panjang untuk mengatasi masalah beras melalui otomasi pertanian juga gagal mencapai hasil yang diharapkan, karena tingginya biaya penelitian dan pembelian peralatan mekanis. Temuan tersebut berbeda dengan metode persawahan yang awalnya dilakukan oleh para pendatang asal Jawa di Gedong Tatan pada tahun 1916 dan kemudian dipelajari dan diadopsi oleh penduduk asli dengan sistem irigasi, sehingga di kemudian hari membuahkan hasil yang sangat positif. Prestasi tersebut diawali dengan pembangunan saluran irigasi Way Tebu di Tanggamus dan Pringsewu. Sejak tahun 1917, proyek ini telah diluncurkan dan dieksplorasi di berbagai lokasi sungai, termasuk Way Sekampung. Jalan Nenep, Jalan Tebu, dan sungai-sungai lain di wilayah kolonial yang kondisi topografinya selesai pada tahun 1922 (Karsiwan, Wakidi, 2013).

Sistem irigasi di Lampung, yang dikembangkan pada masa kolonial Belanda, merupakan contoh upaya

politik yang etis. Pada masa kolonial, Pemerintah Provinsi Lampung menggunakan sistem irigasi tebu untuk mengairi tanaman di Lampung, khususnya di Kabupaten Pringsewu. Laporan BPS Kabupaten Pringsewu tahun 2020 mengungkapkan terjadi penyesuaian dari tahun ke tahun. Meskipun ekspansi pertanian di Pringsewu semakin meningkat, jumlah dan luas irigasi belum bertambah. Hal ini menunjukkan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh Irigasi Way Tebu I, II, III, dan IV. Irigasi Way Tebu tidak hanya diterapkan pada sektor pertanian, namun juga pada sektor perikanan (Royani & Pratama, 2022).



Gambar 3. Bendungan Way Tebu 1930-Sekarang

Sumber: Koleksi Tropenmuseum, Amsterdam (NMvW) Nomor Arsip 60013150

“Bekas saluran irigasi yang dibuat pada masa penjajahan Hindia Belanda ditemukan pada saat menyalurkan air irigasi ke sawah. Parit menurut Kriteria Perencanaan Pengairan (KP-04) adalah saluran buatan yang dilalui air, terbuat dari beton bertulang, kayu, baja, atau besi beton. dengan permukaan bebas dan dirancang untuk mengalir melintasi lembah dengan panjang tertentu.”

Karena irigasi Way Tebu merupakan sumber air utama bagi Desa Pringsewu, maka hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan desa tersebut. Air untuk keperluan pertanian dan perikanan. Pengairan pertanian dilakukan secara terbalik pada musim kemarau karena air Saluran irigasi Way Tebu sebagian besar dimanfaatkan untuk penangkapan ikan. Mayoritas masyarakat Pringsewu adalah petani dan sangat bergantung pada irigasi Way Tebu. Melihat hal ini, kita dapat melihat bahwa Saluran Irigasi Jalan Tebu sangat bermanfaat bagi tujuan keberlanjutan masyarakat Pringsewu karena memberikan peluang pengembangan ekonomi di bidang pertanian dan perikanan (Royani & Pratama, 2022).

Selain itu pengaruh politik etis di Sukadana, awal mula kolonisasi Sukadana disebabkan usainya penjajahan Gedon Tatan, sehingga pemerintah hindia Belanda menetap di wilayah baru bagian utara Tanjung Karang pada tahun 1932 yang disebut Gedon Dalem. Di sinilah dimulainya penjajahan Sukadana pada tahun 1934. Pertanian adalah pekerjaan yang mendominasi masyarakat Jawa oleh karena itu mereka sangat berperan penting bagi perekonomian pemerintah Hindia Belanda, sehingga kebutuhan akan irigasi atau sarana pengairan menjadi penting karena dibutuhkan bagi lahan pertanian di lokasi barunya.

Pembangunan Bendungan Argoguruh dimulai pada tahun 1935, dengan tujuan untuk Membendung Sungai Way Sekampung dan meninggikan muka air sehingga mengalir ke saluran irigasi dan persawahan di Kolonisasi Sukadana, Lampung. Ir. Wehlburg, pegawai Departemen Pertanian, merancang pembangunan Bendungan Argoguruh tahun 1935. Air irigasi dari sungai masuk ke saluran utama melalui saluran intake untuk menyalurkan air ke kawasan pertanian Koloni Sukadana, Setelah itu, sebuah pintu dibangun untuk membagi dua saluran. Struktur ini masih ada pada saluran mayor dan sekunder. Bangunan pintu kran terletak pada saluran sekunder dan berfungsi untuk mengalirkan air dari saluran sekunder ke saluran tersier, dimana air dialirkan ke sawah (Saputra & Setiawati, 2022).

Pengaruh Bendung Argoguruh bagi kolonisasi sukadana



Gambar 5. Bendung Argoguruh 1935
Sumber: Lampung.id

“Ir. Wehlburg, seorang pegawai Departemen Pertanian, merancang pembangunan Bendungan Argoguruh pada tahun 1935. Nama Argoguruh berasal dari kata “argo” yang berarti bukit, gunung, atau sesuatu yang berhubungan dengan lokasi yang lebih tinggi. Yang dimaksud dengan “guru atau juru bahasa” adalah seseorang yang dikatakan menemukan posisi strategis di mana bendungan itu didirikan.”

a). peningkatan kualitas hidup

Kehadiran saluran irigasi ini meningkatkan kualitas hidup. Para pemukim sebelumnya menanam padi di sawah, namun setelah saluran irigasi dibangun, areal pertanian yang tadinya berupa ladang berubah menjadi persawahan. Hal ini meningkatkan hasil panen petani Sukadana. Irigasi tidak hanya memenuhi kebutuhan air pada lahan pertanian, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar saluran irigasi untuk membantu aktivitas sehari-hari seperti mencuci dan mandi.

b). Produksi Padi

Meskipun kondisi perekonomian di kawasan Sukadana saat itu sedang kurang baik, namun persediaan pangan tetap tercukupi karena terus dikembangkannya pembangunan irigasi, sehingga mengakibatkan beralihnya sebagian lahan yang tadinya berupa ladang menjadi persawahan.

Pola pertanian sawah terus mengiringi tumbuhnya jaringan irigasi, namun saat ini belum seluruhnya dimanfaatkan sebagai lahan persawahan; hanya lahan yang letaknya strategis saja yang cocok untuk dijadikan sawah..

c).Usaha Penggilingan padi

Ada ratusan penggilingan padi yang ada di Karesidenan Lampung, praktis semuanya milik warga Tionghoa. Menjelang musim panen, para perantara pengusaha penggilingan membeli beras dari pemukim yang masih bekerja di sawah. Banyak pemukim menjual beras dalam jumlah besar namun dengan harga rendah, dan ketika perekonomian merosot, mereka terpaksa membeli beras dengan harga lebih tinggi. Selain itu, jika panen mereka gagal, para pemukim akan berhutang kepada para penggilingan. Nomor 450 didirikan pada tanggal 16 Mei 1940. Komisi Pertimbangan, terdiri dari Ketua: G. Ysselstein dan empat anggota lainnya, diantaranya spesialis pertanian padi Ir R. Gunung Iskandar. Peran komisi ini adalah memberikan nasihat kepada warga tentang bagaimana menggunakan wewenang mereka. Situasi membaik setelah undang-undang penggilingan padi diberlakukan pada tahun 1940 (Amboro, 2021).

Pengaruh Politik Etis dalam memperkenalkan tanaman kualitas ekspor bagi masyarakat Lampung

Selain itu, kebijakan Politik Etis memungkinkan masyarakat adat mengeksploitasi sumber daya alam dan menghasilkan barang-barang yang dapat diekspor. Dengan cara ini, Belanda dapat meningkatkan pendapatan ekspor dan pendapatan masyarakat (Gregorius Andika Ariwibowo, 2018). Penjajah di Lampung Kenali dua pola pertanian: sawah dataran rendah (rawa) dan sawah beririgasi. Penduduk Lampung yang tinggal di dekat bantaran sungai menghadapi permasalahan lingkungan. Sungai mempunyai fungsi penting dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Selain mencari ikan di sungai, mereka juga menanam padi di Lebak (rawa). Karena topografinya yang terjal dan hutan belantara yang luas dari barat ke utara, kawasan ini sangat cocok untuk perkebunan, khususnya yang menghasilkan kopi dan hasil hutan. Perkebunan kelapa tumbuh subur di pesisir selatan dan timur kawasan ini dan ditanam secara luas.

Pada musim kemarau, rawa yang kering semakin surut. Penduduk desa membuat saluran-saluran kecil dari sungai untuk mengairi sawah mereka. Irigasi sawah, serupa dengan yang terlihat di Jawa, muncul sekitar abad ke-17 ketika masyarakat Banten menetap di daerah tersebut. Sejak tahun 1905, Pola pertanian ini tumbuh seiring dengan adanya penjajahan dan migrasi penduduk Pulau Jawa. Penduduk setempat juga membudidayakan umbi-umbian dan biji-bijian (De Graaf dan Stibbe, 1918, Tweede Deel: 509-510).

Pada masa kolonial, perkebunan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian Lampung. Pada masa kolonial, Lampung pada dasarnya adalah kota perkebunan yang menghasilkan lada, kopi, kopra, damar, dan rotan (Wellan, 1932: 223). Pemerintah kolonial memberikan kepemilikan properti perkebunan kepada sekitar 166 pengusaha pada tahun 1914, dimana pengusaha lahan mencakup 70% dari total kepemilikan. Pemilik perkebunan mempunyai tanah seluas 519.000 hektar, termasuk perkebunan lada dan karet (Department van Binnenlandsch Bestuur, 1915: 39). Penguasa kolonial Karesidenan Lampung sangat bergantung pada lada sebagai sumber pendapatan utama mereka. Lampung memproduksi Pada tahun 1914, Perusahaan Hindia Timur Belanda memproduksi sekitar 13.207 ton lada. Lampung telah menjadi petani lada terkemuka di Hindia Belanda sejak abad ke-17. Sebelum krisis ekonomi global tahun 1930, lada merupakan produk ekspor paling populer di Lampung untuk memenuhi permintaan pasar rempah-rempah dunia.

Tabel 1. Produksi Lada Lampung 1923-1930

Tahun	Jumlah Produksi (dalam ribu kilogram)
1923	17.762
1925	14.828
1927	9.396
1930	15.812

Sumber: Wellan, 1932:250

Daerah produksi utama lada di Lampung antara lain Semaka, Katimbang, Teluk Area, Betung, Seputih, Sekampung, dan Bawang Tulang. Pada tahun 1918, lebih dari 7.309 bau tanah ditanami lada. Namun sekitar 1.470 tanaman cabai rawit masih belum berproduksi (Anonim, 1918: 39). Selain itu, perkebunan kopi yang dikelola masyarakat tampaknya lebih banyak terdapat di Lampung dibandingkan perkebunan kopi yang dikelola swasta. Perkebunan kopi di Lampung menghasilkan 5.080 ton pada tahun 1929, sedangkan perkebunan swasta hanya menghasilkan 1.424 ton (Wellan, 1932: 256-258). Perkebunan kopi perorangan di Lampung pada masa kolonial. sangat terkena dampak penjajahan dan transmigrasi yang dimulai pada tahun 1905. Para transmigran bertani berbagai komoditas, termasuk kopi, lada, kapas, palawija, dan beras (Wellan, 1932: 108). Akibatnya, permintaan kopi meningkat di seluruh wilayah. Pada tahun 1929, wilayah Keresidenan Lampung berpenduduk sekitar 4.604.000 jiwa akibat perdagangan kopi. Popularitas kopi semakin meningkat, dan pada saat sakit, kopi menjadi makanan pokok masyarakat Lampung. Hal ini disebabkan menurunnya popularitas lada di pasar internasional, serta meningkatnya permintaan produk lada di Lampung (Wellan, 1932: 223).

Tabel 2. Total produksi Kopi di Lampung 1923-1929

Tahun	Total Produksi (dalam ribu kilogram)	Nilai Produksi (dalam ribu Gulden)
1923	1.482	824
1925	2.142	1.959
1927	3.278	2.333
1929	6.526	4.604

Sumber: Wellan, 1932: 256

Tak sampai disitu salah satu Komoditi paling terkenal kala itu adalah tanaman karet. Karet telah populer sejak “ledakan karet” pada tahun 1908–1910. Sektor otomotif dan manufaktur di Hindia Belanda dan di seluruh dunia meningkatkan permintaan karet selama periode ini. Lampung merupakan Daerah penghasil karet utama di Sumatera berada di Sumatera Timur, Riau, dan Aceh. Pada tahun 1913, Lampung memiliki sekitar 54.000 perkebunan. Dilaporkan memiliki aroma seperti karet. Di wilayah Lampung, lebih dari 20 perusahaan perkebunan memiliki properti perkebunan karet melalui konsesi (Department van Binnenlandsch Bestuur, 1915: 252- 255).



Gambar 6. Arsip perkebunan karet di Lampung tahun 1908-1910

Sumber: <https://anri.go.id/>

“Adalah perkebunan karet yang berkembang pesat. Sekitar tahun 1945, kompleks perumahan buruh perkebunan karet.”

Sebagai hasil dari praktik politik etis Belanda, tanaman karet menjadi produk berharga di Lampung, Indonesia, antara tahun 1908 dan 1910. Pada tahun 1896, Cultuuronderneming Way Lima mulai membudidayakan karet sebagai tanaman mitra kopi di Way Lima. Namun pada awal tahun 1900-an, karet menjadi tanaman populer di Lampung. Pada tahun 1908, Harga karet di Bursa Efek London rata-rata mencapai \bar{E} . 8 - f. 9 lembar.. Hal ini meningkatkan permintaan pasar terhadap karet dan memacu perluasan wilayah perkebunan karet di Hindia Belanda, termasuk Lampung. Pada tahun 1909-1912, harga karet meroket hingga rata-rata f. 8 - f. 9 per saham di London Stock Exchange. Hal ini menyebabkan meluasnya lahan perkebunan karet di Lampung dan meningkatkan produksi karet di wilayah tersebut. Karet hevea mulai populer sekitar tahun 1910 karena kemudahan penanaman dan pemeliharaannya. Meningkatnya permintaan pasar terhadap karet berdampak pada bertambahnya jumlah jenis karet hevea, serta harga jual yang semakin tinggi. Dalam situasi ini, perkebunan karet merupakan aspek penting dari strategi politik etis Belanda di Lampung dari tahun 1908 hingga 1910, yang berkonsentrasi pada perluasan infrastruktur irigasi dan perluasan lahan untuk meningkatkan produksi pertanian, khususnya karet (Hanif Risa Mustafa dan Septi Utami, 2022).

SIMPULAN

Politik Etis adalah kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 sebagai tanggapan terhadap kritik terhadap eksploitasi kolonial. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perbaikan kesejahteraan bagi penduduk pribumi melalui tiga aspek utama: edukasi, irigasi, dan emigrasi. Di Lampung, kebijakan ekonomi kolonial Belanda fokus pada pengembangan pertanian, terutama dengan memperkenalkan tanaman komersial yang memiliki nilai ekspor tinggi seperti kopi dan karet. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan kolonial dan eksploitasi sumber daya alam setempat. Implementasi kebijakan ekonomi dalam kerangka Politik Etis membawa dampak signifikan terhadap sektor pertanian di Lampung. Pengembangan infrastruktur irigasi dan perbaikan teknik pertanian membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, meskipun tujuan utamanya tetap berorientasi pada keuntungan ekonomi kolonial. Pembangunan Bendung Argoguruh adalah bagian dari upaya kolonisasi di Sukadana yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas irigasi guna mendukung

pertanian. Bendung ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pertanian lokal tetapi juga menarik minat penduduk untuk bermigrasi ke daerah ini, sejalan dengan program emigrasi dari Politik Etis. Politik Etis mendorong pengenalan dan budidaya tanaman ekspor seperti kopi, karet, dan teh di Lampung. Upaya ini meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola pertanian berorientasi ekspor, yang tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga memperluas pasar hasil bumi Lampung di kancah internasional. meskipun Politik Etis bertujuan untuk memberikan perbaikan kesejahteraan bagi penduduk pribumi, implementasinya di Lampung menunjukkan bahwa tujuan ekonomi kolonial Belanda tetap menjadi prioritas utama. Perubahan dalam sektor pertanian dan pengenalan tanaman ekspor membawa dampak jangka panjang bagi masyarakat setempat, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Daliman, *Sejarah Indonesia Abad XIX-Awal Abad XX: Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 46.
- Anonim. 1918. *De Pepercultuur in de Buitenbezittingen*. Batavia: Landsdrukkerij.
- A.M. Hens, *Het Gronbezit in Zuid Sumatra*, (Den Haag: Korthuis, 1909), hlm. 17.
- Adi Kurniawan, Anindya Prameswari, Y. S. E. (2019). Irigasi dan Pendidikan Politik Etis di Kota Metro. *The Indonesian Journal of Social Studies*, 6(2), 40–47. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpips/article/view/8508/4156>
- Afarat Y Gusti. (2018). Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis Gusti Yasser Arafat UIN Antasari Banjarmasin. *Jurnal Alhadrah*, 17(33), 32–48. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id>
- Amboro, K. (2021). Bendung Argoguruh 1935 dan Potensinya sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah di Lampung. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 100–110. <https://doi.org/10.30743/mkd.v5i1.3470>
- Ariwibowo, G. A. (2018). Aktivitas Ekonomi Dan Perdagangan Di Karesidenan Lampung Pada Periode 1856 Hingga 1930. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 10(2), 431. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v10i2.361>
- C. Fasseur, “The Cultivation System and its Impact on the Dutch Colonial Economy and the Indigenous Society in Nineteenth-Century Java”, dalam C.A. Bayly dan D.H.A. Kolff (ed.), *Two Colonial Empires*, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1986), hlm. 137.
- Danu Ranu Setiawan, Ali Imron, Syaiful M: Perkembangan Sosial-Ekonomi Masyarakat Kolonis Jawa di Daerah Bagelen Lampung Pada Tahun 1905-1945, (Online Published: December 4, 2018).
- Departement van Binnenlandsch Bestuur. 1915. *De Buitenbezittingen 1904 tot 1914, Deel I. Weltevreden: Fillal Albrecht & Co.*
- De Graaf, S., dan D. G. Stibbe. 1918. *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, Tweede Deel*. S-Gravenhage: Martinus Nijhoff
- G. Moedjanto, *G. Moedjanto, Indonesia Abad ke-20 (buku 1)*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 53
- Gregorius Andika Ariwibowo, **AKTIVITAS EKONOMI DAN PERDAGANGAN DI**

KERESIDENAN LAMPUNG PADA PERIODE 1856 HINGGA 1930, (Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat Jl.Cinambo No. 136, Ujungberung, Bandung 10 September 2018).

- Hanif Risa Mustafa dan Septi Utami, Dari Ekspansi hingga Eksploitasi: Perkembangan Perkebunan Swasta Barat di Way Lima Lampung 1800-1932 (Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities Vol. 03 No. 02 Desember 2022 | 53-67).
- Karsiwan, K., Sari, L. R., & Sari, L. R. (2021). Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda pada Masa Politik Etis di Lampung. *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.29300/tjksi.v6i1.4375>
- Karsiwan, Wakidi, M. B. (2013). Pembangunan Irigasi Way Tebu Sebagai Kebijakan Etis Pemerintah Kolonial Belanda Di Pringsewu Tahun 1927. *Pesagi*, 1, 5–24.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pendekatan Ilmu Sejarah Dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia.
- Kristian, Y. (2019). Politik Ekonomi Belanda terhadap Lampung pada Tahun 1800-1942. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Kristiani, Y. (2015). Politik Ekonomi Belanda Terhadap Lampung Pada Tahun 1800-1942. *Riskesdas 2018*, 3, 103–111.
- Kuswono, D. (2019). *Metro Tempo Dulu: Sejarah Metro Era Kolonisasi 1935-1942*. CV. Laduny Alifatama (Penerbit Laduny) Anggota IKAPI.
- Pebrianti, DAMPAK PENERAPAN POLITIK ETHIS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT PALEMBANG TAHUN 1900-1942, (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH FEBRUARI 2019).
- Rangga Galih, D. (2017). Dhimas Rangga Galih. *Journal Pendidikan Sejarah*, 5(3), 751–765.
- Royani, R., & Pratama, R. A. (2022). Jurnal Humanitas Irigasi Way Tebu : Penguatan Agraria dalam Mewujudkan. *Jurnal Humanitas Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 1, 62–70.
- Saputra, F. A., & Setiawati, E. (2022). Bendung Argoguruh Masa Kolonisasi 1935-1942. *Swarnadwipa*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.24127/sd.v5i1.1990>
- Sattar. (2018). *Buku Ajar Perekonomian Indonesia*. Deepublish.
- Susilo, A. (2018). *Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia*. 6, 403–416.
- Vincent, J.H. Houben, “Java in the 19th Century: Consolidation of a Territorial State”, dalam Howard Dick, (et al.), *The Emergence of a National Economy: an Economic History of Indonesia, 1800–2000*, (New South Wales: Allen & Unwin, 2002), hlm. 65.
- Wellan, J.W.J. 1932. Zuid-Sumatra: Economisch Overzicht. Wagenigen: H.Veenan & Zonen.